

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Tahunan BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan suatu kewajiban dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh program kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang optimal melalui informasi yang berkualitas guna mendukung terciptanya pemerintahan yang baik.

Pelayanan yang terbaik yang dihasilkan dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan dapat dilihat dan dianalisis dari Laporan Tahunan yang memuat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDMD selama satu tahun, untuk melihat perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu serta berbagai guna dapat diselesaikan pada tahun-tahun mendatang.

Pembentukan BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedudukan BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai komponen yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri sesuai dengan kebutuhan kerja, disamping itu pengembangan kompetensi merupakan hak dan kesempatan yang dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pengembangan pola karier sebagaimana diamanatkan oleh undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 70 ayat 1 disebutkan bahwa “ Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan dalam pengembangan kompetensi. Dan ayat 2 disebutkan bahwa “ Pengembangan Kompetensi yang disebutkan pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan workshop.

BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi NTB merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan pemerintah fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup ASN Kabupaten/Kota dan ASN Provinsi Pemerintah Nusa Tenggara Barat dengan mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki kemampuan dasar/manajerial melalui pelatihan pengembangan kompetensi latsar CPNS ,diklat struktural kepemimpinan,diklat fungsional, diklat teknis dan uji sertifikasi kompetensi jabatan fungsional tertentu.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran secara singkat tentang pelaksanaan program dan kegiatan pada BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun anggaran 2020 dalam rangka merealisasikan tujuan BPSDM Daerah Provinsi NTB yaitu Terwujudnya ASN NTB yang memiliki Kompetensi .

2. Tujuan

Laporan tahunan ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2020, baik mengenai keberhasilan maupun dalam menghadapi kendala yang dihadapi,serta pemecahan masalah yang sudah dilaksanakan. Dan dari penyusunan laporan tahunan ini sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

1.3. Sistematika Penyusunan

Laporan Tahunan BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BPSDM Daerah Tahun 2020 “ Nomor 157/ DPPA/ TAPD/ 2020 . Di samping itu jenis program prioritas pada BPSDM Daerah Provinsi NTB untuk urusan kediklatan mengacu pada RPJMD dan RENSTRA tahun 2019-2023 yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun Sistematika Laporan Tahunan BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB Provinsi NTB Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BPSDMD PEMERINTAH PROVINSI NUSATENGGARA BARAT

Pada bab ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi, sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya keuangan serta kebijakan dan manajemen.

BAB III : PROGRAM KERJA TAHUN 2020

Pada bab ini menjelaskan tentang misi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan.

BAB IV : PROGRES PENDAPATAN,BELANJA DAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

Pada bab ini menjelaskan tentang target dan realisasi pendapatan,belanja serta hasil program kegiatan yang telah dicapai.

BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II
GAMBARAN UMUM
BPSDM DAERAH PROVINSI NTB

2.1 . Tugas dan Fungsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi atau disebut BPSDMD Provinsi NTB mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sesuai pasal 8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPSDM Daerah Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BSDMD Provinsi NTB dalam melaksanakan urusan serta tugas dan fungsinya, difokuskan pada Dimensi Kompetensi. Dimensi kompetensi merupakan salah satu dari empat komponen yang digunakan untuk mengukur nilai Indeks Profesionalisme ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh Aparat Sipil Negara dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dengan jenis diklat kompetensi yaitu diklat kompetensi manajerial, diklat kompetensi fungsional, dan diklat kompetensi teknis. Target Nilai Indeks Profesionalitas ASN BSDMD Provinsi NTB pada tahun 2020 sebesar 0,24 %

2.2. Susunan Organisasi

Sebagai organisasi perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki penjenjangan dalam struktur Organisasi mulai dari Kepala Badan sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada di bawahnya sebagai unsur pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB terdiri dari:

- A. Kepala;

B. Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Subbagian Program;
- 2) Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- 3) Subbagian Keuangan.

C. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial , terdiri dari:

- 1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
- 2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan;
- 3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Prajabatan.

D. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional, terdiri dari:

- 1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
- 2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
- 3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.

E. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, terdiri dari:

Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Dan Pilihan;

Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Non Pelayanan Dasar;

Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.

F. Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengelolaan Kelembagaan, terdiri dari :

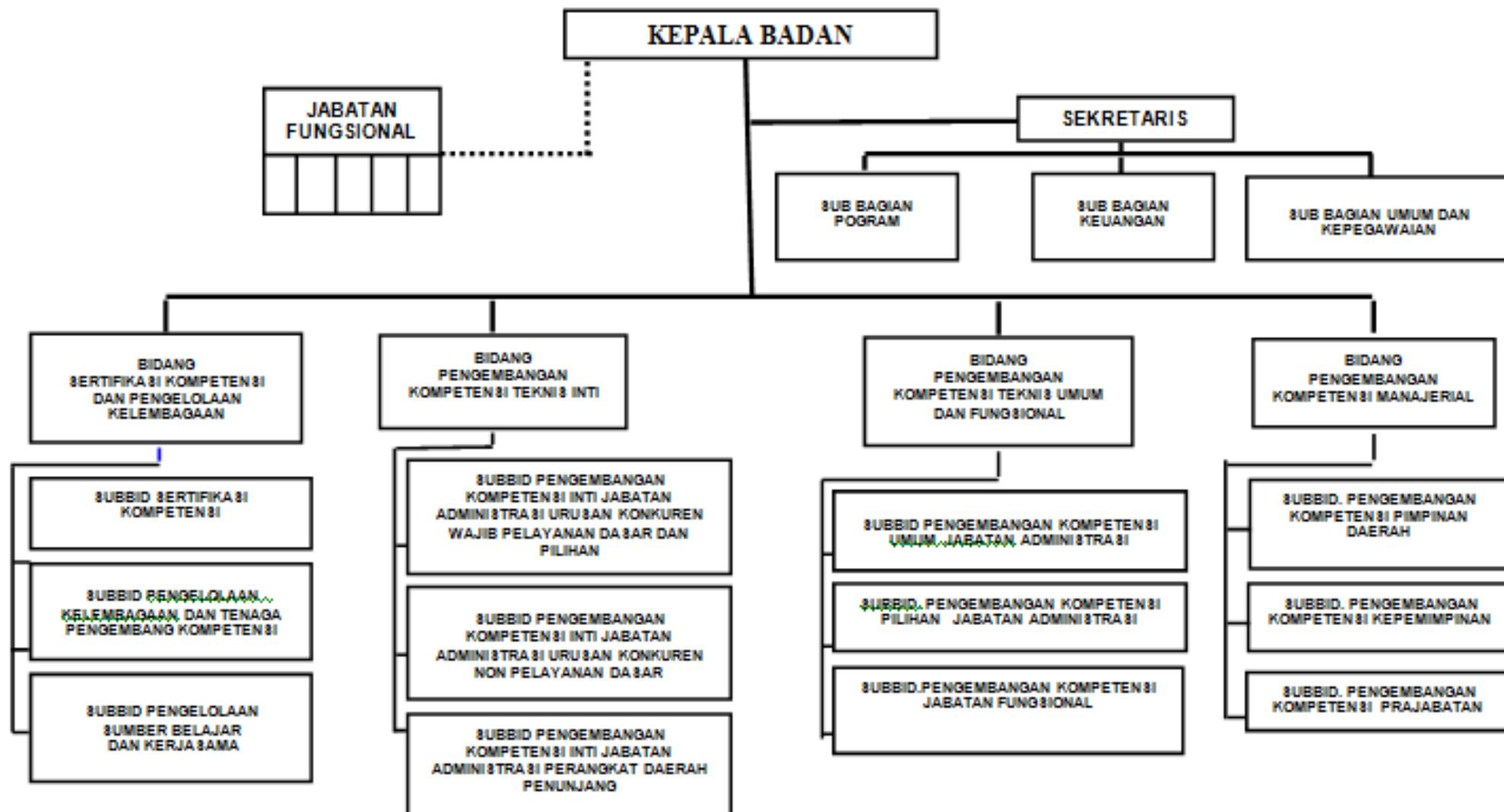
- 1) Subbidang Sertifikasi Kompetensi;
- 2) Subbidang Kelembagaan Dan Tenaga Pengembang Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan;
- 3) Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama

G. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari

- 1) 29 orang Widyaiswara
- 2) 1 orang Pustakawan
- 3) 1 Orang Analis Kepegawaian

Adapun bagan struktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA (BPSDM) PROVINSI NTB**



2.3 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting pada setiap organisasi, dimana manusia sebagai penggerak dan pengelola sumber daya-sumber daya lainnya. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab organisasi adalah memperoleh, menata, memotivasi, dan mengendalikan sumber daya manusianya untuk mencapai kemajuan organisasi dengan efektif. Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, BPSDMD Provinsi NTB harus didukung sumber daya manusia yang cukup dari segi jumlah, tingkat pendidikan, kompetensi, maupun distribusinya. Oleh karena itu pemenuhan sumber daya manusia yang cukup dengan tingkat pendidikan dan kompetensi merupakan salah satu fokus dalam manajemen SDM internal BPSDMD Provinsi NTB. Berbagai kegiatan kedepan harus bisa mencerminkan bagaimana organisasi memperkuat sumberdaya manusia dengan mendorong pengisian pegawai yang telah memasuki masa pensiun, peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan serta kebijakan penempatan yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kondisi sumber daya aparatur BPSDMD Provinsi NTB dapat ditunjukkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.1

Jumlah Pegawai BPSDM DAERAH Prov NTB Berdasarkan Golongan

Per Desember 2020

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	30 Orang
2	III	47 Orang
3	II	18 Orang
4	I	-
5	Non ASN	2 Orang
5	CS	37 Orang
TOTAL		134 orang

Sedangkan dari komposisi menurut status dan pendidikan adalah sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 2.3.2

**Jumlah Pegawai BPSDM DAERAH Prov. NTB
Berdasarkan Status Pendidikan
per Desember 2020**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	STATUS		
		PNS	PTT	Jumlah
1	Strata 3	2		2
2	Strata 2	36		36
3	Strata 1	30	9	39
4	D4	4		4
5	D3	1		1
6	SMA/SMK	22	24	46
7	SMP		3	3
8	SD		3	3
Jumlah		95	39	134

Tabel 2.3.2

**Jumlah Pegawai BPSDM DAERAH Prov NTB Berdasarkan Jabatan
per Desember 2020**

Nomor	JABATAN	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	5 orang
3	Eselon IV	15 orang
4	Fungsional Umum	42 orang
5	Fungsional Tertentu	32 orang
TOTAL		95 orang

2.4 Gambaran Aset yang Dikelola.

BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdiri di atas areal seluas 6673 m² dengan 1 sertifikat kepemilikan terdiri dari kantor BPSDMD Provinsi NTB, SMAN 3 Mataram dan TK Pembina Mataram berlokasi di Jalan Pemuda Mataram yang merupakan asset Pemerintah Provinsi NTB. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Nusa Tenggara Barat disediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

**Jumlah Sarana dan Prasarana
Tahun 2020**

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Gedung Kantor :		
Gedung Aula Rinjani	1 lokal	Kondisi bangunan Baik
Gedung Wisma Tambora :		
- Kamar	73 Kamar	Kondisi bangunan Baik
- Aula	2 lokal	
- Room (ruang rapat)	6 lokal	
Gedung Wisma Praja:		
- Kamar	29 kamar	Kondisi bangunan Baik
Musholla	1 lokal	Kondisi bangunan Baik
Gedung Kelas :		
- Ruang Kelas	12 kelas	Kondisi bangunan Baik
- Ruang Widya Iswara	1 Lokal	
- Ruang Makan	1 Lokal	
- Ruang CAT	1 Lokal	Kondisi bangunan rusak ringan
Gedung perkantoran	1 lokal	
Kendaraan Dinas		
Kendaraan roda 4	11 bh	Baik
Kendaraan roda 2	15 bh	Tidak baik dan dalam proses penghapusan
Roda 3	1 buah	Baik
Peralatan dan Perlengkapan Kantor:		
Komputer	15 bh	Baik
Laptop	46 bh	Baik
LCD	21 bh	Baik
Mesin genset	2 bh	Baik
Meubelair :		

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
- Meja	250 bh	Baik
- Kursi	750.000 bh	Baik
Pemotong rumput :		
- Mesin pemotong rumput dorong	2 bh	Baik
- Mesin pemotong rumput gendong	3 bh	Baik
Printer	14 bh	Baik

Selain itu, untuk menunjang kegiatan pembelajaran di BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai ruang perpustakaan dengan inventaris buku dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Bahan Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah Eksamplar
Ilmu computer	30	33
Filsafat	43	58
Agama	50	69
Sosial Politik	80	123
Ekonomi	61	70
Hukum	179	217
Pemerintahan	127	171
Pendidikan	92	98
Bahasa	33	39
Ilmu Kesehatan	20	23
Pertanian Perikanan	47	49
Manajemen	184	210
Sastra	12	12
Sejarah	50	55
KKPP Kepemimpinan Tk. IV	549	1.098
KKPP Kepemimpinan Tingkat III	316	632
Laporan Aktualisasi Pelatihan Prajabatan CPNS	3.094	6.145
Jumlah	4.967	9.145

BAB III
PROGRAM KERJA
TAHUN 2020

3.1 Misi dan Tujuan

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Tahun 2019–2023, Adapun matriks Rencana Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang disusun pada BPSDM Daerah Provinsi NTB :

Uraian	Permendagri 90
MISI KE-2	NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi
TUJUAN	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN RPJM	Meningkatnya Profesionalisme ASN
INDIKATOR SASARAN	Indeks Profesionalisme ASN
TUJUAN OPD	Terwujudnya ASN NTB yang memiliki Kompetensi
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi
SASARAN OPD	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Sasaran	Tingkat Kompetensi ASN
STRATEGI	Peningkatan Kapasitas ASN melalui Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional
PROGRAM	Pengembangan Sumber Daya Manusia
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Kompetensi Manajerial
	Persentase Kompetensi Fungsional
	Persentase Kompetensi Teknis
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi

3.2 Tujuan, Indikator,Sasaran Strategi dan arah kebijakan

Tabel
Tujuan, Indikator, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Program dan Kegiatan
BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 (Permendagri 13 tahun 2016)

Tujuan OPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program/kegiatan	Strategi	Arah Kebijakan				
					2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya ASN NTB yang memiliki kompetensi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Informasi Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi	Peningkatan Kapasitas ASN melalui Pengembangan Kompetensi Manajerial,Teknis Fungsional dan Uji Kompetensi	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Percentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Percentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Percentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD						

Tujuan OPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program/kegiatan	Strategi	Arah Kebijakan				
					Arah Kebijakan				
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Percentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Aset						
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Percentasi Kompetensi Manajerial	Peningkatan Kualitas SDM ASN						
		Percentase Kompetensi Fungsional							
		Percentase Kompetensi Tekhnis							
		Percentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi							

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB tahun 2020 yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Satuan	Target
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rek	3
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Org	10
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Org	37
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Unit	5
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis	80
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jenis	4
8	Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	10
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	2
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Org	1
11	Penyediaan makanan dan minuman	Org	600
12	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Org	30
13	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Org	100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	Satuan	Target
1	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Unit	4
2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Unit	27

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	Satuan	Target
1	Peningkatan mental fisik aparatur	org	124

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No.	Kegiatan	Satuan	Target
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	3
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dok	1
3	Penyusunan rencana kerja SKPD	Dok	4

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Kegiatan	Satuan	Target
1	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	org	3

6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (merupakan program prioritas).

Berikut adalah jenis kegiatan yang mendukung program prioritas BPSDMD Provinsi pada tahun 2020 yaitu:

No.	Kegiatan	Satuan	Target
1.	Pengembangan Kompetensi Prajabatan	org	400
2	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	org	180
3	Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah	org	10
4	Pengembangan Komptensi Jabatan Fungsional	org	120
5	Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	org	240
6	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	org	361
7	Pengembangan Komptensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	org	120
8.	Sertifikasi Kompetensi	org	45
9.	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	org	60
10.	Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	org	30
11.	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	org	4

BAB IV

PROGRES PENDAPATAN, BELANJA DAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2020

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah tersedianya anggaran yang memadai. Selama tahun 2020, pelaksanaan program dan kegiatan BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibiayai dengan APBD Sesuai dengan Dokumen Peaksanaan Anggaran (DPA) BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2020, bahwa pelaksanaan anggaran diperuntukkan bagi Belanja Operasi dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) dan belanja barang dan jasa (program/ kegiatan). Adapun progres pendapatan yang menjadi tanggung BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus setorkan ke dalam kas daerah.

Pada Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dirinci sebagai berikut :

4.1. Anggaran Pendapatan BPSDM Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Pajak Daerah, BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan penerimaan melalui kegiatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pendapatan penyelenggaraan diklat. Realisasi Pendapatan dari pos tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan BPSDMD Provinsi NTB TA 2020

Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	914.050.000	297.075.000	32,50
Hasil Retribusi Daerah :	914.050.000	297.075.000	32,50
Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah	644.250.000	143.625.000	22,29
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggarahan / villa	269.800.000	153.450.000	56,88
Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:	0	0	0
Pendapatan dari penyelenggaraan Pendidikan	0	0	0
Penerimaan lain-lain	0	0	0

Anggaran Pendapatan BPSDM Daerah Provinsi NTB tahun 2020 sebesar Rp. 914.050.000 dengan realisasi sebesar Rp.297.075.000 atau 32,50 %.

4.2 Anggaran Belanja BPSDM Daerah Provinsi NTB.

Total target anggaran Belanja BPSDM Daerah Provinsi NTB tahun 2020 sebesar Rp. 17.126.694.806,50 dengan realisasi sebesar Rp.15.224.468.116 atau 88,89 % terdiri dari:

1. Belanja operasi

Belanja Operasi tahun 2020 dengan pagu anggaran Rp. 16.361.564.306,50 realisasi Rp.14.475.287.616 atau 88,47 % meliputi belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai pada BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Belanja Pegawai

yang dianggarkan berdasarkan jumlah belanja gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan PNS yang dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.1.1	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		10.678.389.000	10.253.879.523	96,02

Belanja Pegawai tahun 2020 dianggarkan senilai Rp. 10.678.389.000 dan terealisasi senilai Rp. 10.253.879.523 atau sebesar 96,02 %. Rincian belanja pegawai terdiri dari:

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	6.675.087.500	6.504.956.523	97,45
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.975.880.000	3.748.923.000	94,29
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	27.421.500	0	0
Jumlah	10.678.389.000	10.253.879.523	96,02

Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang sifatnya habis pakai . Realisasi belanja barang pada BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.1.2	Belanja barang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		5.683.175.306,50	4.221.408.093	74,28

Belanja Barang tahun 2020 dianggarkan senilai Rp. 5.683.175.306,50 dan terealisasi senilai Rp. 4.221.408.093 atau 74,28 %. Belanja barang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
	Belanja Pegawai	741.141.000,00	679.416.000,00	
	Honorarium PNS	731.141.000,00	679.416.000,00	92,93
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	589.525.000,00	560.850.000,00	95,14
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	56.275.000,00	47.200.000,00	83,87
3	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.025.000,00	550.000,00	27,16
4	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	83.316.000,00	70.816.000,00	85,00
	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	-	0,00
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	-	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	4.942.034.307	3.541.992.093	71,67
1	Belanja bahan pakai habis	294.557.970	207.772.460	70,54
2	Belanja bahan/material	33.830.000	13.260.000	39,20
3	Belanja jasa kantor	2.002.701.793,50	1.661.097.336	82,94
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.667.777	151.650.244	76,33
5	Belanja cetak dan penggandaan	211.522.400	127.065.000	60,07
6	Belanja sewa sarana mobilitas	3.500.000	1.750.000	50,00
7	Belanja makanan & minuman	350.281.027	215.097.369	61,41
8	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.500.000	7.750.000	30,39
9	Belanja perjalanan dinas	1.345.754.391	792.503.256	58,89
10	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	188.830.000	126.130.000	66,80
11	Belanja Pemeliharaan	286.888.948	237.916.428,00	82,93
	Jumlah	5.683.175.306,50	4.221.408.093,00	74,28

2.Belanja Modal.

4.2.2	Belanja Modal	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		765.130.500	749.180.500	97,92

Belanja Modal tahun 2020 dianggarkan senilai Rp. 765.130.500 dan terealisasi senilai Rp. 749.180.500 atau 97,92 %. Belanja Modal tahun 2020 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
2	Belanja modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	36.325.000,00	36.325.000,00	100,00
3	Belanja modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)	129.100.000,00	120.080.000,00	93,01
4	Belanja modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	549.380.500,00	542.450.500,00	98,74
5	Belanja modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.325.000,00	10.325.000,00	100,00
	Jumlah	765.130.500,00	749.180.500,00	97,92

4.3 Hasil Pelaksanaan Program/ Kegiatan

Adapun realisasi program dan kegiatan pada BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut :

A. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi :

- (4.06.01.01.01.02) *Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik* pagu anggaran Rp. 570.068.801 realisasi Rp. 446.523.936

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	78,33	100	rek	3	3

Realisasi kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun 2020 terdiri dari pembayaran jaringan internet/telepon, listrik.

- (4.06.01.01.01.07) *Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan* pagu anggaran Rp. Rp. 103.099.870 realisasi Rp.86.568.490

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan	83,97	100	Org	10	8

Realisasi kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan tahun 2020 terdiri dari terbayarnya 8 orang pengelola administrasi keuangan yaitu Pejabat penatausahaan keuangan 1 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara penerimaan 1 orang, dan pembantu bendahara pengeluaran 5 orang . Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan administrasi keuangan pada BPSDMDaerah Provinsi NTB.

- (4.06.01.01.01.08) *Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor* pagu anggaran Rp. 1.119.008.800 realisasi Rp.1.070.990.400

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyediaan jasa kebersihan kantor	95,71	100	orang	37	37

Realisasi kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor tahun 2020 terdiri dari pembayaran honor petugas kebersihan sejumlah 37 orang dan pembelian perlengkapan kebersihan setiap bulannya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang terciptanya ruang kerja yang nyaman dan bersih di lingkungan pada BPSDMD Provinsi NTB, melalui ketersediaan petugas jasa kebersihan dan alat – alat kebersihan yang cukup.

- (4.06.01.01.01.09) *Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja* pagu anggaran Rp.58.750.000 realisasi Rp.31.521.000

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	53,65	100	unit	5	120

Realisasi Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan tahun 2020 terdiri dari perbaikan 120 peralatan kerja yaitu sound system 1 unit, laptop 5 unit, AC 23 unit, pompa air 6

unit, lift 1 unit, CCTV 48 unit, dan rekondisi lemari pakain 36 unit . Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung kegiatan pada BPSDMD Provinsi NTB. Adapun realisasi melebihi target disebabkan oleh melebihinya anggaran dan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2020 dibandingkan anggaran dan target kinerja pada RENSTRA BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- (4.06.01.01.10) *Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor* pagu anggaran Rp. 12.733. 600 realisasi Rp. 12.303.500

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyediaan alat tulis kantor	96,62	100	jenis	80	80

Realisasi Kegiatan Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor tahun 2020 terdiri dari 80 jenis alat tulis kantor pada sekretariat.

- (4.06.01.01.11) *Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan* pagu anggaran Rp. 13.530.000 realisasi Rp. 7.710.000

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	56,98	100	jenis	4	4

Realisasi belanja Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tahun 2020 terdiri dari 4 jenis yaitu bahan publikasi/dokumentasi/ dekorasi (cetak spanduk, baliho dan bendera lambing daerah),belanja cetak (cetak amplop besar berkop ,map OPD, dan lembar disposisi), fotocopy dan penjilidan. Penyediaan biaya cetak dan penggandaan ini memiliki peran yang penting mengingat dalam pelaksanaan kegiatan tidak bisa terlepas dari kebutuhan percetakan dan penggandaan.

- (4.06.01.01.12) *Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor* pagu anggaran Rp.18.717.000 realisasi Rp. 15.940.000

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	85,16	100	jenis	10	10

Realisasi belanja Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan tahun 2020 terdiri dari 10 jenis alat listrik dengan jenis yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.

- (4.06.01.01.13) *Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor* pagu anggaran Rp. 765.130.500 realisasi Rp. 749.180.500

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	97,92	100	jenis	4	4

Adapun realisasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah diadakan pada tahun 2020 adalah sebanyak 4 jenis, yaitu:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair (Meja Komputer CAT) sebanyak 40 buah
 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin (AC split 2 PK sebanyak 6 unit.
 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (televisi sebanyak 4 buah, kamera webcam sebanyak 5 unit ,kamera digital sebanyak 1 unit, stabilizer camera sebanyak 1 unit).
 4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (komputer sebanyak 5 unit, pengadaan komputer laboratorioum CAT 1 paket)
- (4.06.01.01.15) *Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan* pagu anggaran Rp. 17.952.993 realisasi Rp. 13.000.000.

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan	72,41	100	jenis	1	1

Realisasi Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tahun 2020 terdiri dari 1 jenis selama satu tahun anggaran.

- (4.06.01.01.17) *Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman* pagu anggaran Rp. 45.826.027 realisasi Rp. 32.650.069

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyediaan makanan dan minuman	71,25	93	orang	600	555

Realisasi kegiatan Penyediaan makan dan minum tahun 2020 terdiri dari penyediaan makan dan minum kegiatan rapat dan untuk tamu sebanyak 555 orang.

- (4.06.01.01.18) Kegiatan Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah pagu anggaran Rp. 152.559.330 realisasi Rp. 98.981.487

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah	64,88	75	orang	30	6

Realisasi Kegiatan Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah tahun 2020 yaitu perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 6 kali perjalanan, dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan konsultasi dan koordinasi yang dilakukan ke Kementerian dan atau Lembaga Negara terkait pelaksanaan kediklatan . Namun karena adanya Adanya PSBB dimasa covid 19, konsultasi dan koordinasi yang dilakukan ke luar daerah lebih banyak dilakukan secara daring. Adapun anggaran pada kegiatan ini digunakan juga untuk membiayai akreditasi Lemabaga BPSDM Provinsi NTB.

- (4.06.01.01.20) Kegiatan Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota pagu anggaran Rp. 84.630.000 realisasi Rp. 56.063.270.

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	66,25	100	orang	100	116

Realisasi Kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2020 yaitu perjalanan dinas ke Kabupaten Kota sebanyak 116 orang. Kegiatan ini direalisasikan untuk mendukung capaian program dan kegiatan lainnya melalui monitoring evaluasi dan sosialisasi terkait program kediklatan antar instansi Provinsi NTB dan instansi antar Kab/Kota. Namun Adapun kegiatan ini digunakan juga untuk dalam rangka pendampingan pemberian bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak covid 19 di dalam daerah Nusa Tenggara Barat.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- (4.06.01.02.22) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pagu anggaran Rp. 231.138.948 realisasi Rp. 207.995.428

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	89,99	100	unit	4	4

Realisasi Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tahun 2020 yaitu pemeliharaan 4 unit Gedung pada BPSDM Daerah Provinsi NTB.

- (4.06.01.01.02.24) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional pagu anggaran Rp. 198.667.777 realisasi Rp. 151.650.244

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	76,33	100	unit	27	27

Realisasi kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional pada tahun 2020 terdiri dari pemeliharaan 27 jenis kendaraan dinas operasional yaitu kendaraan roda 4 sebanyak 11 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 16 unit. Pemeliharaan kendaraan dinas di kegiatan ini terdiri dari service, penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas dan pelumas serta biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- (4.06.01.01.05.04) Kegiatan Peningkatan mental dan fisik aparatur pagu anggaran Rp. 13.250.000 realisasi Rp. 5.665.000.

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Peningkatan mental dan fisik aparatur	42,75	100	orang	124	124

Realisasi Kegiatan Peningkatan mental dan fisik tahun 2020 yaitu pelaksanaan olahraga dan kegiatan imtaq untuk ASN maupun staf non ASN di lingkungan BPSDM Pemerintah Provinsi NTB yang berjumlah 124 orang. Penyebab tidak tingginya realisasi keuangan yaitu 42,75 % realisasi fisik 100 % karena perhitungan target tetap setiap bulannya sesuai dengan jumlah ASN dan non ASN yang ada pada BPSDM Provinsi NTB sedangkan kegiatan tidak sepenuhnya dilakukan setiap minggu terutama pada triwulan II dan III pada tahun 2020 karena covid 19.

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- (4.06.01.01.06.01) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu anggaran Rp. 131.266.600 realisasi Rp. 117.205.600

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89,29	100	dok	3	3

Realisasi Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tahun 2020 terdiri dari 3 dokumen yaitu realisasi penyusunan dokumen RENJA T.A 2019, dokumen LAKIP/ LKJIP dan laporan tahunan tahun 2019.

- (4.06.01.01.06.02) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pagu Rp. 61.610.000 realisasi Rp. 50.290.000

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	81,63	100	dok	1	1

Realisasi Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran tahun 2020 yaitu adanya penyusunan dokumen laporan keuangan tahun 2020 yang dilaksanakan setiap akhir periode. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalankan fungsi sebagai entitas akuntansi.

- (4.06.01.01.06.05) Kegiatan Penyusunan Rencana SKPD Pagu Rp. 313.864.100 realisasi Rp. 296.663.800

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Penyusunan Rencana SKPD.	94,52	100	dok	2	4

Realisasi Kegiatan Penyusunan Rencana SKPD tahun 2020 yaitu adanya penyusunan dokumen RKAP tahun 2020, dokumen RKA tahun 2021, penyusun dokumen rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN di Nusa Tenggara Barat, dan dokumen Review RENSTRA tahun 2021 – 2023.

E. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan daerah

- (4.06.01.01.07.01) Kegiatan Peningkatan manajeman Asset/ Barang Milik Daerah pagu Rp. 89.400.000 realisasi Rp. 79.500.000

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Peningkatan manajeman Asset/ Barang Milik Daerah	88,93	100	orang	3	3

Realisasi kegiatan peningkatan manajeman asset/ barang milik daerah tahun 2020 yaitu berupa pembayaran honorarium pengelola barang milik daerah sebanyak 1 orang , penyusun laporan BMD sebanyak 1 orang dan honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 1 orang.

Keberadaan barang milik daerah bagi sebuah OPD merupakan salah satu sumber daya yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) OPD. Oleh sebab itu seperti yang ditegaskan dalam PP No.6 Tahun 2006 maupun Permendagri No.17 Tahun 2007 bahwa status OPD dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah sebagai Pengguna. Artinya OPD hanya dapat menguasai BMD sepanjang dipergunakan untuk penyelenggaraan tupoksinya.

F. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Target Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2020 yang merupakan target program prioritas dari BSDMD Provinsi NTB yaitu sebesar 0,24 dengan realisasi Nilai Indeks

Dimensi Kompetensi ASN sebesar 0,16 atau baru mencapai 66,66%. Realisasi Target ini dicapai dengan mengintegrasikan data pengembangan kompetensi ASN pada OPD lain yang dihimpun oleh BKD Provinsi NTB dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan di BPSDMD Provinsi NTB sesuai dengan anggaran yang tersedia. Capaian Target kegiatan pada BPSDMD Provinsi NTB mencapai 0,03% di Tahun 2020. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dengan jenis pengembangan kompetensi yaitu diklat manajerial, diklat fungsional, dan diklat teknis yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi NTB, serta pengembangan kompetensi ASN diluar Diklat seperti Bimtek, workshop, seminar dan lain sebagainya.

- (4.06.01.01.16.01) *Kegiatan Pengembangan Kompetensi Prajabatan* pagu Rp119.618.200 realisasi Rp. 67.355.970

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Prajabatan	56,31	0	orang	400	0

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Prajabatan pada tahun 2020 tidak dapat terlaksana baik secara online maupun offline, hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2020 adanya wabah covid 19 yang melanda Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat. Pandemi covid 19 ini juga menyebabkan test SKB dan pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2020 menjadi tertunda, pengalihan anggaran pada anggaran perubahan juga tidak dapat dilaksanakan karena anggaran diklat ini sebagian besar direfocusing untuk membiayai kebutuhan covid 19. Adapun realisasi keuangan yang telah terealisasi digunakan untuk membiayai kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Latsar Tahun Anggaran 2021 ke BKPSDM Kab/Kota se NTB, sedangkan untuk perjalanan dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi ke LAN RI di Jakarta terkait persiapan pelaksanaan Latsar TA. 2020. Perjalanan konsultasi ini dilaksanakan pada bulan Maret sebelum pemberlakuan PSBB terkait Covid dan sebelum refocusing anggaran dilakukan.

Walaupun tidak dapat melaksanakan kegiatan dengan menggunakan APBD pada BPSDM Daerah Provinsi NTB pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Prajabatan tetap melaksanakan kegiatan berupa:

- Memfasilitasi kegiatan Pelatihan Latsar Kabupaten Dompu dengan Pola Kerjasama, dengan sasaran sebanyak 186 orang. Pelaksanaan Pelatihan Latsar Kabupaten Dompu ini dilaksanakan pada Bulan Maret 2020.
- Memfasilitasi seminar akhir Pelatihan Latsar Kabupaten Bima sebanyak 89 orang. Seminar akhir ini dilaksanakan pada bulan April 2020 dengan metode daring (zoom meeting).
- Menyusun adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Sekretaris Daerah bagi Kabupaten/Kota yang menganggarkan kegiatan Latsar dengan Pola Kontribusi untuk Tahun Anggaran 2021.
- (4.06.01.01.16.02) *Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan* pagu Rp. 90.372.200 realisasi Rp. 61.801.700

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	68,39	0	orang	180	0

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan pada tahun 2020 tidak dapat terlaksana, hal ini disebabkan karena adanya wabah covid 19, sehingga anggaran pada kegiatan ini dilakukan refocusing. Adapun rencana kegiatan yang semula akan dialihkan pada anggaran perubahan tahun 2020 yaitu Bimbingan Teknis bagi Lurah se Pulau Lombok sebanyak 30 orang. Namun kegiatan ini tetap tidak dapat terlaksana karena SPD (surat pencairan dana) pada kegiatan ini tidak dapat dikeluarkan sepenuhnya oleh BPKAD Provinsi NTB, melihat kondisi keuangan pada kas daerah yang tidak dapat memenuhi seluruh anggaran belanja pada masing – masing OPD. Adapun realisasi keuangan yang telah terealisasi digunakan untuk membiayai kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Diklat PKA,PKM dan PKN II Tahun Anggaran 2021 ke BKPSDM Kab/Kota se Pulau Lombok sedangkan perjalanan dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi ke LAN RI dan LAN Jatinangor Bandung terkait persiapan pelaksanaan terkait persiapan pelaksanaan PKA,PKP, PKN II dan persiapan akreditasi PKN II untuk tahun 2020, perjalanan luar daerah ini dilaksanakan bulan Januari sd Maret sebelum pemberlakuan PSBB terkait Covid dan sebelum refocusing anggaran dilakukan.

Walaupun tidak terdapat pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan pada tahun 2020, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Memfasilitasi kegiatan PKN II Kementerian Kesehatan RI sebanyak 60 peserta dengan pelaksanaan via daring (zoom meeting) dimana alokasi kegiatan adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pemerintahan Desa dan Pencatatan Sipil, BKBPP, Dinas Tenaga Kerja, DLHK Provinsi NTB. Pelaksanaan bulan Agustus 2020.
- Memfasilitasi Stula kegiatan PKP Provinsi Riau sebanyak 40 peserta dengan pelaksanaan via daring (zoom meeting) dimana lokus kegiatan adalah Bapedda, BPSDMD, Inspektorat Provinsi NTB. Pelaksanaan bulan Oktober 2020.
- Menyusun Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Sekretaris Daerah bagi Kabupaten/Kota yang menganggarkan kegiatan PKP, PKA dan PKN dengan Pola Kontribusi untuk TA 2021.
- Membuat surat Permohonan Ijin Prinsip Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar tahun 2021 ke LAN RI dengan Nomor Surat :800/749/BPSDMD-PKM/2020 tanggal 23 November 2020.

- (4.06.01.01.16.03) *Kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah* Pagu Rp. 156.930.200 realisasi Rp. 38.719.100

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah	24,67	0	orang	10	0

Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan pada tahun 2020 yang direncanakan untuk Bimtek Lurah se NTB dan Pembekalan Kepribadian Istri DPRD Provinsi NTB tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena anggaran pada kegiatan ini direfocusing untuk anggaran covid 19 dan SPD (surat pencairan dana) kegiatan ini tidak dapat dikeluarkan.

Adapun realisasi keuangan yang telah terealisasi digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan pada bulan Februari 2020 dalam rangka Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Lurah ke Biro Pemerintahan Setda Kab/Kota se Pulau Lombok terkait permintaan informasi dan masukan jumlah Lurah dan materi yang ingin didapatkan pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknis. Untuk perjalanan dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi ke BPSDM Kemendagri terkait pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Lurah, dan Study Komperatif ke BPSDM Provinsi Bali terkait pelaksanaan dan penganggaran PKN II di BPSDM Provinsi Bali, perjalanan luar daerah ini dilaksanakan bulan Januari sd Maret sebelum pemberlakuan PSBB terkait Covid dan sebelum refocusing anggaran dilakukan.

Kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan dengan menggunakan APBDP BPSDM Daerah Provinsi NTB antara lain :

- Memfasilitasi Kunjungan Kerja Komisi I DPRD KSB.
- Memfasilitasi Pendalaman Tugas Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima berupa RAB Kegiatan, Jadwal Kegiatan.
- Melakukan Monitoring dan Monev kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kota Bima di Hotel Grand Legi tanggal 9 November 2020.

- (4.06.01.01.16.04) *Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional* Pagu Rp. 495.537.700 realisasi Rp. 354.962.600

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	71,63	75	orang	120	30

Realisasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional tahun 2020 yaitu terlaksananya Diklat Pranata Humas Tingkat Ahli dengan peserta 30 orang yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari s.d 21 Maret 2020. Peserta Diklat Pranata Humas Tingkat Ahli berasal dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2020. Adapun rencana kegiatan yang akan dialihkan dan yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2020, tetap tidak dapat terlaksana karena SPD (surat pencairan dana) pada kegiatan ini tidak dapat dikeluarkan sepenuhnya oleh BPKAD Provinsi NTB, melihat kondisi keuangan pada kas daerah yang tidak dapat memenuhi seluruh anggaran belanja pada masing – masing OPD.

- (4.06.01.01.16.05) *Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi* Pagu Rp. 230.319.674 realisasi Rp. 111.297.987

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	48,32	50	orang	240	30

Realisasi kegiatan Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi tahun 2020 untuk sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi yaitu Diklat Analisis Jabatan Angkatan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah peserta 30 orang yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari s.d 03 Maret 2020. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena tidak terdapat dalam SPD (Surat Penyediaan Dana).

Realisasi kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi tahun 2020 tidak ada yang terlaksana. Diklat Teknis Pengelolaan Kearsipan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret s.d 3 April 2020 tidak bisa terlaksana karena adanya pandemi Covid-19, dan terbitnya Surat Edaran Gubernur NTB Nomor : 360/170/BPBD/III/2020, tanggal 22 Maret 2020, perihal Kewaspadaan Segenap Komponen, Masyarakat NTB dalam Penanganan Covid-19 maka kegiatan diklat ditunda.

Pelaksanaan Kegiatan dijadwalkan tanggal 20 s.d 24 Oktober 2020 tetapi pelaksanaan diklat tidak bisa dilaksanakan karena Anggaran untuk pelaksanaan tidak tersedia dalam SPD (Surat Penyediaan Dana).

- (4.06.01.01.16.06) *Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar* Pagu Rp. 176.660.600 realisasi Rp. 125.770.496

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	71,19	100	orang	361	60

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tahun 2020 pada target RENSTRA tahun 2019 – 2023 berjumlah 361 orang sedangkan di DPAP tahun 2020 berjumlah 60 orang. Realisasi kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tahun 2020 untuk Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar yaitu terlaksananya Diklat Evaluasi Kinerja BSC dan A3 Berbasis Logical Frame Work Analysis (LFA) pada tanggal 2-6 Nopember 2020, jumlah peserta 30 orang, dengan anggaran Rp.90.323.550 terealisasi Rp. 65.253.498 atau 72,24% sedangkan untuk Sub Bidang Pengembangan

Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar yaitu terlaksananya Diklat Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kerangka Kerja Logis pada 19-23 Oktober 2020 jumlah peserta 30 orang dengan anggaran Rp. 86.337.050 terealisasi Rp. 60.566.998 atau 70,15 %. Seluruh kegiatan yang direncanakan pada APBD Perubahan dapat dilaksanakan dengan baik hanya terjadi perubahan metode pembelajaran dan beberapa item kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terdapat pada SPD yang baru sehingga menyebabkan Anggaran yang semula telah ditetapkan untuk item tersebut tidak dapat direalisasikan dan menjadi SILPA.

- (4.06.01.01.16.07) *Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang* Pagu Rp. 144.843.800 realisasi Rp. 57.095.100

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Perangkat Daerah Penunjang	39,42	50	orang	120	22

Realisasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Perangkat Daerah Penunjang yaitu terlaksananya Diklat Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 1 angkatan pada tanggal 24 Februari s.d 5 Maret 2020 jumlah peserta 30 orang. Kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Perangkat Daerah Penunjang tahun 2020 pada target RENSTRA tahun 2019 – 2023 berjumlah 120 orang, sedangkan pada DPAP tahun 2020 target berjumlah 60 orang (Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa 2 (dua) Angkatan. Target tidak tercapai karena, tidak terlaksananya Diklat Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Angkatan II karena SPD (Surat Pencairan Dana) pada kegiatan tersebut tidak dapat dicairkan.

- (4.06.01.01.16.08) *Kegiatan Sertifikasi Kompetensi* Pagu Rp. 114.007.930 realisasi Rp. 47.628.430

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Kegiatan Sertifikasi Kompetensi	41,78	50,12	orang	45	36

Realisasi Kegiatan Sertifikasi Kompetensi tahun 2020 yaitu Jumlah Uji Kompetensi Pejabat fungsional Polisi Pamong Praja berjumlah 36 orang berasal dari Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 27 orang, Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 4 orang dan Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebanyak 5 orang. Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 23 s.d 25 Nopember 2020 secara online.

**Data Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja yang mengikuti
Uji Kompetensi Berdasarkan jenjang Jabatan**

No	TINGKAT	JENJANG	JUMLAH	KET
1	Keahlian	Pertama	9	
		Muda	1	
	Jumlah		10	
2	Keterampilan	Pemula	1	
		Terampil	20	
		Mahir	5	
	Jumlah		26	
	TOTAL		36	

Untuk Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat tempat Pelaksanaan Uji Kompetensi di pusatkan di Ruang CAT Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan untuk Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa dilaksanakan di Kantor masing-masing.

Rapat Pleno penetapan hasil Uji Kompetensi dilaksanakan setelah semua proses Uji Kompetensi dilaksanakan. Rapat Pleno dipimpin oleh Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Kemneterian Dalam Negeri RI. Berdasarkan hasil Penilaian semua materi Uji Kompetensi dari 36 orang Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja yang mengikuti Uji Kompetensi 35 orang Peserta dinyatakan Kompeten/Lulus dan 1 orang dinyatakan belum kompetensi/Tidak lulus.

- (4.06.01.01.16.09) *Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi* pagu Rp. 294.232.800 realisasi Rp. 127.440.715

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	43,31	100	org	60	110

Realisasi Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi tahun 2020 terdiri dari :

- I. **Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengembang Kompetensi melalui Pelatihan/Workshop/Seminar.**

I.1 **Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar PKN Tingkat II**

Dalam upaya peningkatan kompetensi Widya iswara sebagai tenaga pengembang kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta persiapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dapat melaksanakan Pelatihan kepemimpinan Nasional Tingkat II, tahun 2020 melalui Sub Bidang Pengelolaan kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi melaksanakan Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Workshop Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dilakukan dalam rangka

mempersiapkan tenaga pengembang kompetensi dalam hal ini widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan maksud untuk terpenuhinya kompetensi widyaiswara untuk dapat memenuhi syarat menjadi narasumber/ Fasilitator/pengampu materi pada pelaksanaan Pelatihan kepemimpinan Nasional Tingkat II.

Workshop Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 10 sampai dengan 11 Desember 2020 bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di fasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan Pola Full E-Learning. Jumlah Widyaiswara yang mengikuti Workshop Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebanyak 22 orang dengan rincian sebagai tabel 5 berikut :

Jumlah Widyaiswara yang mengikuti Pelatihan

Kepemimpinan Nasional Tingkat II

Tahun 2020

No	Widyaiswara Jenjang	Jumlah
1.	Widyaiswara Jenjang Utama	10
2.	Widyaiswara Jenjang Madya	12
Jumlah		22

1.2 Workshop Penyiapan Tenaga pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).

Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dilakukan dalam rangka mempersiapkan tenaga pengembang kompetensi dalam hal ini widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan maksud untuk terpenuhinya kompetensi widyaiswara untuk dapat memenuhi syarat menjadi narasumber/ Fasilitator/pengampu materi pada pelaksanaan Pelatihan kepemimpinan Administrator. Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 2 kali pelaksanaan yaitu Tahap I dilaksanakan mulai tanggal 20 April s/d 6 Mei Mei 2020 dan Tahap II dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d 25 Desember 2020.

Adapun pelaksanaan Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahap I yang dilaksanakan tanggal 20 April s/d 6 Mei Mei 2020 diikuti oleh 15 orang Peserta yang berasal dari 14 Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB dan 1 orang Widyaiswara dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi. sedangkan Pelaksanaan Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrasi yang dilaksanakan dari tanggal 12 s.d 25 Desember diikuti oleh 8 orang Widyaiswara yang seluruhnya merupakan Pejabat fungsional Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jadi untuk Tahun 2020 jumlah Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah mengikuti Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrasi sebanyak 23 orang Widyaiswara.

**Jumlah Widyaaiswara yang mengikuti Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar
Pelatihan Kepemimpinan Administrasi
Tahun 2020.**

No	Peminatan	Jumlah	Keterangan
1.	Agenda I (Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme)	5	1 Orang Widyaaiswara Ahli Madya pada BKPSDM Kota Sukabumi. (Agenda III)
2.	Agenda II (Kepemimpinan Kinerja)	8	
3	Agenda III (Manajemen Kinerja)	10	
Jumlah		23	

1.3 Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dilakukan dalam rangka mempersiapkan tenaga pengembang kompetensi dalam hal ini widyaaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan maksud untuk terpenuhinya kompetensi widyaaiswara untuk dapat memenuhi syarat menjadi narasumber/ Fasilitator/pengampu materi pada pelaksanaan Pelatihan kepemimpinan Pengawas.

Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 2 kali pelaksanaan yaitu Tahap I dilaksanakan mulai tanggal 20 April s/d 6 Mei Mei 2020 dan Tahap II dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d 25 Desember 2020.

Adapun pelaksanaan Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahap I yang dilaksanakan tanggal 20 April s/d 6 Mei Mei 2020 diikuti oleh 10 orang Peserta yang berasal dari 9 orang Widyaaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB dan 1 orang Widyaaiswara dari Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Kementerian Pertanian. Sedangkan Pelaksanaan Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahap II yang dilaksanakan dari tanggal 12 s.d 25 Desember diikuti oleh 10 orang Widyaaiswara yang seluruhnya merupakan Pejabat fungsional Widyaaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jadi untuk Tahun 2020 jumlah Widyaaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah mengikuti Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 20 orang Widyaaiswara.

**Jumlah Widyaaiswara yang mengikuti Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Tahun 2020.**

No	Jenjang Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Agenda I (Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme)	4	1 Orang Widyaaiswara pada PPMKP kementerian Pertanian. (Agenda III)
2.	Agenda II (Kepemimpinan Kinerja)	8	
3.	Agenda III (Manajemen Kinerja)	8	
Jumlah		20	

1.4 Workshop Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

Workshop Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan bagi Manajemen dan penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Hal ini juga sebagai bagian penting dalam akreditasi program Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Workshop Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 20 sampai dengan 24 April 2020 yang diikuti oleh 32 orang peserta yang berasal dari unsur Manajemen selaku penyelenggara kegiatan pelatihan.

Jumlah Peserta Workshop Penyelenggara PKA dan PKP Tahun 2020.

No	Jenjang Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi	1
2.	Pejabat Administrator	5
3.	Pejabat Pengawas	14
4.	Pejabat pelaksana	12
Jumlah		32

II. Pelaksanaan Akreditasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 telah mengajukan untuk dilakukan proses akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil sidang akreditasi yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Lembaga Administrasi Negara pada tanggal 26 Nopember 2020 bahwa untuk akreditasi Lembaga Pelatihan diperpanjang waktunya sampai dengan Februari 2021. Sehingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih bisa melengkapi bahan-bahan yang masih kurang paling lambat akhir Januari 2021.

Sesuai dengan hasil sidang Tim Akreditasi Lembaga Administrasi Negara terkait perpanjangan masa proses pelaksanaan akreditasi untuk Lembaga penyelenggara pelatihan yang diperpanjang sampai Pebruari 2021 maka langkah yang ditempuh untuk dapat melengkapi bahan-bahan yang masih kurang adalah dengan membentuk Tim Penyusunan Bahan Akreditasi Lembaga Pelatihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan proses Akreditasi terhadap Akreditasi Lembaga Pelatihan, Akreditasi Program Pelatihan PKN Tingkat II dan Akreditasi Program Pelatihan PBJ.

a. Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.

Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II diajukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan agar pada tahun 2021 dapat melaksanakan Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II secara mandiri. Berdasarkan hasil sidang Tim Akreditasi dari Lembaga

Administrasi Negara tanggal 26 Nopember 2020, hasil Penilaian Akreditasi untuk Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II adalah “Tidak terakreditasi dengan Nilai 57,43.” Hasil tersebut diperoleh karena banyaknya berkas-berkas yang diminta sebagai bagian dari penilaian akreditasi belum bisa terpenuhi khususnya terkait dengan berkas penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2017 dan 2019 yang memang penyelenggaranya adalah lembaga Administrasi Negara LAN sedangkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB hanya kebagian sebagai tempat penyelenggaraan pelatihan.

b. Akreditasi Program Pelatihan Barang/Jasa

Pelatihan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Lembaga yang telah tersertifikasi sebagai Tempat Uji Kompetensi Pengadaan barang/jasa Mandiri (TUK PBJ Mandiri) dengan sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : TUK-089-099 Tanggal 12 Agustus 2019 dengan masa berlaku sampai dengan 12 Agustus 2023. Sedangkan Akreditasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penyelenggara Pelatihan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah berakhir pada tanggal 1 Oktober 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Agar Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap dapat melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Uji Kompetensi bagi peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan usulan untuk Re-Akreditasi. Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Kepala pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dengan surat Nomor 800/511/BPSDMD/2020 tanggal 29 September 2020.

Pengajuan Re-Akreditasi tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena pengaruh dari sistem kerja akibat pengaruh bencana non alam yaitu covid-19, Hal ini juga berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 9860/D.3.3/09/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/jasa.

Berdasarkan hasil konsultasi terakhir dengan Panitia Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa proses akreditasi akan dilanjutkan pada tahun 2021 untuk kegiatan fisitasi yang akan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2021.

Realisasi keuangan pada kegiatan ini mencapai 43,31 % dengan realisasi fisik 100 %, di mana target pada kegiatan ini juga lebih kecil dibandingkan dengan realisasinya yaitu Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengembang Kompetensi melalui Pelatihan/Workshop/Seminar sejumlah 110 orang dengan target 60 orang, hal ini disebabkan karena Pelatihan/Workshop/Seminar sebagian besar dilaksanakan dengan metode E Learning sehingga pengeluaran bisa lebih di efisiensi.

- (4.06.01.01.16.10) Kegiatan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama pagu Rp. 94.479.300 realisasi Rp. 49.605.210.

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Kegiatan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	52,50	100	orang	30	28

Realisasi Kegiatan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama dalam rangka Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama pada Tahun 2020 meliputi :

I. Peningkatan Kompetensi Widyaiswara melalui Workshop;

Pada Tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan Kelembagaan pada Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan kerjasama memprogramkan kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh widyaiswara dan manajemen melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar Berbasis E-Learning.

Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar Berbasis E-Learning dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 23 sampai dengan 25 Nopember 2020 bertempat di Wisma Tambora Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Narasumber pada kegiatan Workshop adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar sebanyak 28 orang yang terdiri dari unsur Widyaiswara dan Manajemen.

Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar Berbasis E-Learning Tahun 2020

No	UNSUR	JUMLAH
1	Widyaiswara	25
2.	Manajemen	3
Jumlah		28

II. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota meliputi:

a. Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama

Pada Tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan kelembagaan pada Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama menyusun Kesepakatan Bersama tentang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun Maksud dan Tujuan dibuat Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama antara Para Pihak (Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota) dalam

rangka Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan dan menjalin hubungan kerjasama kelembagaan antara Para Pihak (Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Jumlah Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Para Pihak (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk Tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) Kesepakatan Bersama. Yaitu dengan Pemerintah Kabupaten/Kota :

- a. Kota Mataram
- b. Kabupaten Lombok Barat
- c. Kabupaten Lombok Tengah
- d. Kabupaten Lombok Timur
- e. Kabupaten Lombok Utara
- f. Kabupaten Sumbawa Barat
- g. Kabupaten Sumbawa
- h. Kabupaten Dompu
- i. Kabupaten Bima dan,
- j. Kota Bima.

b. Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Naskah Perjanjian Kerja Sama merupakan tindak lanjut atas telah ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat. Perjanjian Kerjasama pada Tahun 2020 baru dilakukan dengan 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Dompu yaitu Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2020.

III. Pengelolaan Perpustakaan.

Salah satu tugas dan Fungsi yang ada pada Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama adalah Pengelolaan Perpustakaan yang ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sampai dengan saat ini jumlah Bahan Pustaka yang dikelola oleh Perpustakaan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 9.145 Eksamplar dengan 17 Jenis Bahan Pustaka dan 4.967. Adapun rincianx sebagai berikut.

**Jenis Bahan Pustaka yang ada pada Perpustakaan
BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

No	Jenis Bahan Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah Eksamplar	Ket
1.	Ilmu computer	30	33	
2.	Filsafat	43	58	
3.	Agama	50	69	
4.	Sosial Politik	80	123	
5.	Ekonomi	61	70	
6.	Hukum	179	217	
7.	Pemerintahan	127	171	
8.	Pendidikan	92	98	
9.	Bahasa	33	39	
10.	Ilmu Kesehatan	20	23	
11.	Pertanian Perikanan	47	49	
12.	Manajemen	184	210	

13.	Sastra	12	12	
14.	Sejarah	50	55	
15.	KKPP Kepemimpinan Tk. IV	549	1.098	
16.	KKPP Kepemimpinan Tingkat III	316	632	
17.	Laporan Aktualisasi Pelatihan Prajabatan CPNS	3.094	6.145	
Jumlah		4.967	9.145	

Dari jumlah tersebut tambahan bahan pustaka pada tahun 2020 sebanyak 672 eksemplar terdiri dari 407 buku dan 265 Laporan Aktualisasi Pelatihan Prajabatan.

Realisasi keuangan pada kegiatan ini mencapai 52,50 % dengan realisasi fisik 100 %, hal ini karena pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar Berbasis E-Learning ini ada beberapa kegiatan pendukung pelaksanaan bimtek yang tidak sesuai dengan perencanaan akibat covid 19 yaitu biaya perjalanan dinas narasumber yang seharusnya orang menjadi 1 orang dan makan minum kegiatan yang seharusnya untuk 5 hari menjadi 3 hari.

- (4.06.01.01.16.11) *Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme* pagu Rp. 530.099.057 realisasi Rp. 398.508.561

Uraian	Realisasi		Indikator Kinerja		
	% Keu	% Fisik	Satuan	Target	Realisasi
Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	75,18	100	orang	4	17

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme tahun 2020 merupakan salah satu bagian dari tugas dan fungsi Sub. Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi. Di mana dalam kegiatan ini terpusat pada kegiatan pengembangan kompetensi widyaiswara BPSDM Provinsi NTB.

Tenaga Pengembang Kompetensi Widyaiswara merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik untuk pelatihan Manajerial, Teknis dan Fungsional, Pelatihan Sosial Kultur dan lain sebagainya.

Widyaiswara Berdasarkan Jenjang Jabatan.

Sampai dengan Akhir Desember 2020 Jumlah Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 30 (tiga Puluh). Berdasarkan Jenjang Jabatan masing-masing Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Kondisi Widyaikswara pada BPSDMD Provinsi NTB
Berdasarkan Jenjang Jabatan
s.d Desember 2020.**

No	Jenjang Jabatan	Jumlah
1.	Widyaikswara Ahli Utama	11
2.	Widyaikswara Ahli Madya	13
3.	Widyaikswara Ahli Muda	1
4.	Widyaikswara Ahli Pertama	5
Jumlah		30

Orasi Ilmiah Widyaikswara

Orasi Ilmiah sebagai syarat untuk menduduki Jabatan Fungsional Widyaikswara Ahli Utama di Pusdiklat Kemenristekdikti. Di mana dalam orasi ilmiah ini dilakukan pengukuhan bagi Widyaikswara Ahli Utama sebagai wujud akademis atas jabatan yang dipangkunya. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa Widyaikswara yang akan menduduki jabatan Widyaikswara Ahli Utama dan Widyaikswara yang pengangkatannya berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) berkewajiban untuk melaksanakan orasi ilmiah.

Widyaikswara yang diwajibkan untuk mengikuti orasi ilmiah adalah Widyaikswara yang diangkat melalui jalur inpassing yang pengangkatannya dari Pejabat Pimpinan Tinggi dan diangkat dalam jabatan Widyaikswara Ahli Utama serta Widyaikswara Ahli Madya yang akan naik Jabatan ke Widyaikswara Ahli Utama. Sampai dengan bulan Desember 2020 Jumlah Widyaikswara yang belum menyelesaikan orasi ilmiah sebanyak 15 orang terdiri dari Widyaikswara yang pengangkatannya melalui Inpassing jabatan Pimpinan Tinggi dan diangkat dalam jabatan Widyaikswara Ahli Utama sebanyak 5 orang serta Widyaikswara Ahli Madya yang akan naik jenjang Jabatan ke Widyaikswara Ahli Utama sebanyak 10 orang.

Realisasi Kegiatan pada Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme tahun 2020 antara lain :

I. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Profesi Widyaikswara Berupa Pelatihan Penjenjangan Kewidyaikswaraan.

Sesuai amanat Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaikswara dan Angka Kreditnya, “ Bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, Widyaikswara yang akan naik jenjang jabatan, harus mengikuti dan lulus Diklat Penjenjangan Widyaikswara dan Uji Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.

Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengembang Kompetensi melalui pelatihan dalam hal ini Widyaikswara Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengikuti sertakan Widyaikswara untuk mengikuti beberapa pelatihan pada tahun 2020 antara lain :

**Jumlah Widya Iswara BPSDMD Provinsi NTB
yang mengikuti Diklat Penjenjangan Kewidya Iswaraan
Tahun 2020.**

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah
1.	Penjenjangan Kewidya Iswaraan Tingkat Tinggi	10
2.	Penjenjangan Kewidya Iswaraan Tingkat Menengah	1
3.	Penjenjangan Kewidya Iswaraan Tingkat Lanjutan	2
Jumlah		13

II. Pelatihan/Workshop/ Teknis/Fungsional di Luar Daerah

Untuk meningkatkan kompetensi Widya Iswara sebagai tenaga pengembang kompetensi perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan/Workshop teknis dan atau fungsional dalam upaya mendukung kompetensi widya Iswara dalam mengampu materi pelajaran. Kegiatan Pelatihan/Workshop teknis dan atau fungsional bagi widya Iswara disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki untuk mengampu suatu materi pelatihan.

Widya Iswara yang mengikuti Pelatihan/Workshop teknis dan/atau fungsional tahun 2020 di luar daerah sebanyak 4 (empat) Orang. Adapun pelatihan teknis dan/atau fungsional yang diikuti antara lain :

- a. Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
- b. Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan kepemimpinan Pengawas).

III. Pelatihan/Workshop/ Teknis/Fungsional di Luar Daerah

Untuk meningkatkan kompetensi Widya Iswara sebagai tenaga pengembang kompetensi perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan/Workshop teknis dan atau fungsional dalam upaya mendukung kompetensi widya Iswara dalam mengampu materi pelajaran. Kegiatan Pelatihan/Workshop teknis dan atau fungsional bagi widya Iswara disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki untuk mengampu suatu materi pelatihan.

Widya Iswara yang mengikuti Pelatihan/Workshop teknis dan/atau fungsional tahun 2020 di luar daerah sebanyak 4 (empat) Orang. Adapun pelatihan teknis dan/atau fungsional yang diikuti antara lain :

- a. Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
- b. Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan kepemimpinan Pengawas

BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

5.1. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh BPSDM Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 melalui dana APBD dapat diuraikan sebagai berikut:

PERMASALAHAN	SOLUSI
'Refocusing anggaran pada tahun 2020 mengakibatkan kekurangnya anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan	Menyesuaikan kegiatan dengan anggaran dan Merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya
Pembatalan beberapa kegiatan di masa pandemi covid 19 (PSBB) sehingga beberapa kegiatan dan konsultasi tertunda	koordinasi, konsultasi dan kegiatan kediklatan dilakukan dengan sistem daring.
Target RENSTRA yang tidak sesuai dengan jumlah anggaran pada DPA sehingga capaian program kegiatan tidak tercapai	Menyesuaikan kegiatan dengan anggaran
'SPD (Surat Pencairan Dana) yang terbit dari BPKAD tidak sama dengan yang ada pada anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana	Merencanakan ulang kegiatan tersebut pada penganggaran berikutnya dan berkoordinasi dengan BPKAD terkait pencairan SPD

Sumber: BPSDM Provinsi NTB, 2020

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

BSDMD Provinsi NTB dalam melaksanakan urusan serta tugas dan fungsinya, difokuskan pada Dimensi Kompetensi. Dimensi kompetensi merupakan salah satu dari empat komponen yang digunakan untuk mengukur nilai Indeks Profesionalisme ASN di mana dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dengan jenis diklat kompetensi yaitu diklat kompetensi manajerial, diklat kompetensi fungsional, dan diklat kompetensi teknis. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Target Nilai Indeks Profesionalitas ASN BSDMD Provinsi NTB pada tahun 2020 sebesar 0,24 % dengan realisasi nilai Indeks Dimensi Kompetensi ASN sebesar 0,16 atau baru mencapai 66,66%. Realisasi Target ini dicapai dengan mengintegrasikan data pengembangan kompetensi ASN pada OPD lain yang dihimpun oleh BKD Provinsi NTB dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan di BPSDMD Provinsi NTB sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sedangkan dilihat dari Capaian Target kegiatan pada BPSDMD Provinsi NTB mencapai 0,03%.

Laporan Tahunan BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2020 ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BPSDM Daerah Tahun 2020 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat “ Nomor 157/ DPPA/ TAPD/ 2020 tanggal 06 Oktober tahun 2020 , RPJMD tahun 2019-2023 dan Renstra tahun 2019-2023.

Namun Mengingat masa pandemi yang sampai saat ini belum berakhir, kondisi anggaran Daerah Provinsi NTB telah mengalami beberapa kali recfocusing/pengurangan dan penerapan SPD yang baru sangat berpengaruh pada realisasi kegiatan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) yang berasal dari anggaran APBD Provinsi NTB Tahun 2020, bahwa pelaksanaan anggaran dialokasikan untuk pendapatan sebesar **Rp.914.050.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 297.075.000** atau **32,50 %** dan anggaran belanja sebesar **Rp.17.126694.806,50** dengan realisasi sebesar **Rp.15.224.468.116** atau **88,89 %**.

Mataram, 2021

**Kepala BPSDM Daerah Pemerintah Daerah
Provinsi NTB**
Pengguna Anggaran

Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, M.TP
NIP. 19610810 199003 1 011